

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan sampel penelitian**

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Dalam penelitian ini subyek penelitiannya adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di wilayah kerja kantor wilayah Dirjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan sampling konvenien (*convenience sampling*) yang merupakan metode penarikan sampel dengan mendapatkan unit atau orang yang paling mudah diakses (konvenien) atau sebagai kumpulan informasi dari anggota populasi yang mudah diperoleh dan mampu menyediakan informasi tersebut (Suhartono, 2014).

#### **3.2 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yang merupakan analisis data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik (Siregar, 2013).

#### **3.3 Jenis dan sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama

atau tempat objek penelitian dilakukan. Sumber data primer penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di wilayah kerja kantor wilayah Dirjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3.4 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui teknik kuesioner yaitu suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada (Siregar, 2013).

### 3.5 Operasionalisasi penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax amnesty* sedangkan variabel independennya adalah pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan.

**Tabel 3.1**

#### **Ringkasan variabel penelitian, dimensi, indikator dan skala pengukuran**

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
<i>Tax amnesty</i>	Partisipasi	1. daftar <i>tax amnesty</i> 2. tidak daftar <i>tax</i>	1 0

		<i>amnesty</i>	
Pemahaman peraturan perpajakan (Handayani dkk, 2014)	Undang-undang Pajak dan <i>tax amnesty</i>	1. memahami ketentuan umum perpajakan, 2. memahami peraturan amnesti pajak	ordinal
Sanksi perpajakan (Istanto, 2010)	Undang-undang Pajak dan <i>tax amnesty</i>	1. Sanksi pajak 2. Penegakan hukum oleh aparat pajak 3. Sosialisasi Sanksi pajak	ordinal
Kualitas layanan perpajakan (Supriyatna 2008, dalam Istanto 2010)	1.Keandalan ( <i>realibility</i> ) 2. Empati ( <i>empathy</i> ) 3. Ketanggapan ( <i>responsiveness</i> ) 4. Asuransi ( <i>assurance</i> ) 5. Berwujud ( <i>tangible</i> )	1. – profesionalisme pelayanan 2. kemampuan dalam memberikan perhatian dalam pelayanan 3. kesigapan pelayanan 4. Kenyamanan pelayanan 5. Fasilitas pelayanan	ordinal

### **Skala Pengukuran**

Dalam penelitian ini responden mengisi jawaban yang dianggap paling tepat. Jawaban diukur dengan *likert scale* yang berdimensi 5 skala, yaitu: Skala (1) Sangat Tidak setuju, Skala (2) Tidak Setuju, Skala (3) Ragu- ragu, Skala (4) Setuju dan Skala (5) Sangat Setuju.

Penjelasan lebih lanjut mengenai definisi variabel dependen dan variabel independennya adalah sebagai berikut:

#### 3.5.1 Variabel dependen

##### ***Tax amnesty***

Berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1, Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

*Tax amnesty* dihitung dengan pendekatan dikotomi yaitu dengan melihat wajib pajak mengikuti *tax amnesty*. Wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* diberi nilai 1 dan yang tidak diberi nilai 0.

#### 3.5.2 Variabel independen

##### **Pemahaman peraturan perpajakan**

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib

pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

### **Sanksi perpajakan**

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (Ngadiman dan Huslin, 2015)

Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan sangat diperlukan. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, maka setiap wajib pajak perlu mengetahui dan memahami sanksi-sanksi apa saja di dalam norma perpajakan yang akan mereka peroleh jika mereka melanggar norma perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah, hal ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Winerungan, 2013).

### **Kualitas layanan perpajakan**

Pelayanan yang baik adalah salah satu faktor penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Sebuah layanan dapat baik jika usaha yang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kualitas layanan adalah layanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan kami

dan tetap dalam standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan harus dilakukan terus menerus (Supadmi, 2009).

Memberikan pelayanan yang baik kepada para pembayar pajak berarti bahwa wajib pajak akan terus memenuhi kewajiban mereka membayar pajak maka wajib pajak akan senang dan merasa lebih nyaman serta membantu dalam penyelesaian kewajiban pajak mereka. Hal ini tentu tidak lepas dari peran penting yang dilakukan oleh masing-masing petugas pajak. Petugas pajak diperlukan untuk melayani setiap wajib pajak dengan sopan santun, untuk menghormati kepada wajib pajak sebagai pelanggan, dan untuk memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang perpajakan yang akan mendukung kualitas layanan yang dilakukan oleh petugas pajak untuk wajib pajak. Selain itu, peralatan yang dimiliki oleh kantor pajak juga akan diperlukan, seperti; sarana komunikasi, komputer, ruang tunggu yang bagus, nomor antrian, dan peralatan pendukung lainnya (Setyonugroho dan Sardjono 2013).

### **3.6 Pengujian kualitas data penelitian**

Dalam menganalisis data penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

#### **a. Uji validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur

oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Pengujian validitas dapat dilakukan dengan korelasi bivariante antar masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Untuk pedoman pengukuran validitas ini dilihat dari nilai signifikannya yaitu dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk degree of freedom ( $df$ ) =  $n-2$ , dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel. Untuk menguji valid atau tidak dilihat dari output cronbach alpha pada kolom correlated item. Bandingkan nilai correlated item – total correlation dengan hasil perhitungan  $r$  tabel. Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka dapat dinyatakan valid, begitu juga dengan sebaliknya jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka dapat dinyatakan tidak valid.

**b. Uji reliabilitas**

Uji reliabilitas sebagai alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten (Ghozali, 2011). pengukuran reliabilitas ini diukur dengan One Shot yaitu dengan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $>$  0,70 (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2011).

### 3.7 Teknik analisis data

#### 3.7.1 Analisis deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2011). Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai setiap variable yaitu pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan dan tax amnesty. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan deviasi standard.

#### 3.7.2 Uji hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik. Regresi logistik sebetulnya mirip dengan analisis diskriminan yaitu menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independen (Ghozali, 2011).

Regresi logistik lebih akurat digunakan bila variabel independen merupakan campuran antara variabel diskrit dan kontinu, dan distribusi data yang digunakan tidak normal. Regresi logistik memiliki cakupan yang lebih luas daripada *model logit* (Kuncoro, 2007). Kelebihan metode regresi logistik adalah lebih fleksibel dibanding teknik lain, yaitu:

- a) Regresi logistik tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel bebas yang digunakan dalam model. Artinya, variabel penjelas



tidak harus memiliki distribusi normal, linear, maupun memiliki varian yang sama dalam setiap grup. Ini berbeda dengan analisis diskriminan yang mengharuskan semua variabel bebas berdistribusi normal.

- b) Variabel bebas dalam regresi logistik bisa campuran dari variabel kontinu, diskrit, dan dikotomis.
- c) Regresi logistik amat bermanfaat digunakan apabila distribusi respon atas variabel terikat diharapkan nonlinear dengan satu atau lebih variabel bebas.

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik (*binary logistic regression*). Teknik ini digunakan karena variabel dependen dalam penelitian ini yaitu tax amnesty bersifat dikotomis atau merupakan variabel dummy. Model regresi logistik ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\frac{\ln p}{1 - p} = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \dots + b_k X_k$$

Keterangan:

p = *Tax amnesty*

X1 = Pemahaman peraturan perpajakan

X2 = Sanksi perpajakan

X3 = Kualitas layanan perpajakan

$\beta_1$ - $\beta_2$ - $\beta_3$  = koefisien regresi

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow Goodness of fit* lebih kecil daripada 0,05 maka hipotesis nol ditolak dan model dikatakan tidak fit. Sebaliknya *Hosmer and Lemeshow Goodness of fit* lebih besar daripada 0,05 maka hipotesis nol tidak ditolak yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya (model dikatakan *fit*) atau dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2011).

Untuk menguji hipotesis setiap variabel dilihat dari nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen beserta koefisien regresi (nilai B dalam tabel). Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Sehingga suatu variabel independen dianggap memiliki pengaruh yang signifikan apabila nilai signifikansinya (sig.) lebih kecil dari pada 0,05.